

SISTEM KEUANGAN CASHLESS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KARAWANG

Widiah Anggraini¹, Ujang Suherman

Manajemen, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

mn22,wiadiahanggraini@mhs.ubpkarawang.ac.id , ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id

Abstract

This study aims to examine the implementation of a non-cash (cashless) financial system in supporting more efficient, transparent, and structured financial administration and management at the Ministry of Religious Affairs Office in Karawang Regency. The researcher seeks to gain firsthand understanding of digital transaction practices, identify the challenges encountered, and formulate strategies to optimize the system. The method employed is an implementative approach, involving active participation in administrative and financial management activities, as well as conducting in-depth interviews with relevant staff. The findings indicate that the cashless system has a positive impact on accelerating transaction processes, improving the accuracy of financial records, and enhancing transparency in financial reporting. However, challenges such as limited digital infrastructure, low technological literacy among some employees, and resistance to changes in work systems remain significant obstacles. Therefore, it is necessary to improve human resource competencies, modernize financial administrative management, and strengthen digital infrastructure to support digital financial transformation within government institutions.

Keywords: *Cashless Financial System, Financial Management, Financial Administration, Ministry of Religious Affairs.*

Abstrak

Penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem keuangan berbasis non-tunai (*cashless*) dalam mendukung pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terstruktur di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Peneliti ingin memperoleh pemahaman langsung mengenai pelaksanaan transaksi digital, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menyusun strategi guna mengoptimalkan sistem tersebut. Metode yang digunakan adalah metode implementatif, yaitu dengan terlibat secara aktif dalam kegiatan administrasi dan manajemen keuangan serta melakukan wawancara mendalam dengan pegawai terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *cashless* memberikan dampak positif terhadap percepatan proses transaksi, peningkatan ketepatan pencatatan, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sarana digital, rendahnya literasi teknologi sebagian pegawai, dan adanya resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM, modernisasi pengelolaan administrasi keuangan, serta penguatan infrastruktur digital guna mendorong transformasi keuangan digital di lingkungan instansi pemerintah.

Kata Kunci: *Sistem Keuangan Cashless, Pengelolaan Keuangan, Manajemen Keuangan, Kementrian Agama*

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Sistem keuangan cashless merupakan metode transaksi non-tunai yang berbasis digital untuk meningkatkan *efisiensi*, *transparansi*, dan *akuntabilitas* dalam pengelolaan anggaran. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada uang tunai dalam pembayaran *operasional*, layanan publik, serta pengadaan barang dan jasa. *Transformasi digital* di sektor keuangan mendorong perubahan dari sistem pembayaran berbasis tunai menuju transaksi non-tunai atau cashless [1].

Pemerintah telah mengimplementasikan sistem ini dalam pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan efektivitas, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Berbagai instrumen digital telah diterapkan, seperti Kartu Kredit Pemerintah (KKP), *Marketplace Digital Payment*, serta pembayaran elektronik untuk layanan keagamaan, termasuk pernikahan dan sertifikasi halal. Kebijakan ini diimplementasikan sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019, yang bertujuan mempercepat transaksi, meminimalkan risiko kehilangan uang, serta mencegah potensi penyalahgunaan keuangan [2]

Penerapan sistem keuangan cashless menjadi semakin mendesak dengan meningkatnya digitalisasi ekonomi dan tuntutan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di instansi pemerintah. Sistem ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, mempercepat proses pembayaran, serta memastikan seluruh pencatatan transaksi lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penerapan sistem keuangan digital dapat mendukung perencanaan keuangan yang lebih sistematis, mempermudah pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana instansi [3]

Walaupun penerapan transaksi cashless menawarkan banyak manfaat, pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah, termasuk di Kantor Kementerian Agama Karawang, masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya pemahaman serta keterampilan pegawai terhadap teknologi keuangan, serta adanya resistensi terhadap perubahan sistem transaksi. Selain itu, efektivitas penerapan sistem ini dalam meningkatkan efisiensi keuangan di sektor keagamaan masih belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan serta hambatan dalam implementasinya.

Menanggapi hal tersebut penulis ingin mengetahui tentang implementasi sistem keuangan cashless dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Karawang. Penelitian ini akan berfokus pada efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi untuk mengoptimalkan digitalisasi keuangan di instansi pemerintah.

Selama menjalani kerja praktik di bagian Pembendaharaan Keuangan, praktikan mendapatkan pengalaman langsung dalam berbagai tugas administratif, seperti mengirimkan surat dari bendahara, menyampaikan laporan kepada Perencana untuk diberikan nomor sesuai ketentuan,. Selain itu, saya juga terlibat dalam pencatatan data keuangan, mendata pegawai, mengantarkan surat ke Kepala Kemenag, serta mencatat struk belanja barang bangunan untuk laporan bendahara.

Pengalaman ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan di instansi pemerintah serta peran sistem digital dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Oleh karena itu, saya berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendukung optimalisasi sistem keuangan cashless di Kementerian Agama dan mendorong percepatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.

2. Tinjauan Pustaka Manajemen Keuangan

Menurut Musthafa Manajemen keuangan adalah bidang ilmu yang menarik dan penuh tantangan. Individu yang memiliki minat dalam bidang ini memiliki peluang kerja yang luas di berbagai sektor, seperti manajemen keuangan perusahaan, perbankan, real estate, perusahaan asuransi, hingga sektor pemerintahan. Bahwa penerapan manajemen keuangan sangat berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia, ekonomi mikro dan makro, metode kuantitatif, serta akuntansi. Mempelajari manajemen keuangan memungkinkan seseorang memahami beberapa keputusan penting yang harus dibuat, seperti keputusan investasi, pendanaan, serta kebijakan dividen.[4]

Manajemen keuangan menurut Rebin Sumardi dan Suharyono, (2020) dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan usaha merencanakan, mencari dan mengalokasikan dana untuk memaksimalkan efisiensi operasi Perusahaan.

Pengelolaan Keuangan

Menurut Wardana, pengeluaran konsumsi merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk kebutuhan makanan dan non-makanan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar pendapatan dapat digunakan secara optimal. Pengetahuan keuangan juga berperan penting dalam membentuk kebiasaan finansial yang sehat, membantu individu dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat, serta menghindari kesalahan finansial yang merugikan.[5]

Sistem Keuangan Cashless

Sistem cashless merupakan metode pembayaran tanpa menggunakan uang tunai, yang dijalankan dengan bantuan teknologi digital. Transaksi dilakukan secara elektronik melalui media seperti kartu pintar, aplikasi digital, atau akun virtual. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem ini, pencatatan transaksi menjadi lebih otomatis, risiko kehilangan uang berkurang, dan proses pembayaran menjadi lebih cepat di berbagai bidang.

3. Metodologi Penelitian

Metode penulisan dalam laporan ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis serta akurat mengenai pelaksanaan sistem keuangan cashless di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan staf terkait, survei, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi keuangan. Proses kerja praktik dilaksanakan selama

tiga bulan, dimulai pada tanggal 21 Januari 2025 hingga 21 April 2025, dengan penempatan praktikan pada bagian Bendahara Keuangan, yang merupakan salah satu unit dalam bagian Keuangan di instansi tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Selama pelaksanaan kerja praktik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, praktikan berkesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan operasional bagian keuangan, khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi sistem keuangan instansi. Praktikan mengikuti berbagai aktivitas administrasi seperti pencatatan transaksi, penginputan data pengadaan barang, pembayaran pajak, serta pelaporan keuangan melalui sistem elektronik. Selain itu, praktikan juga turut menangani proses surat menyurat antarunit kerja. Melalui observasi langsung selama masa praktik, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses penerapan sistem keuangan non-tunai (*cashless*) di lingkungan kerja pemerintah.

Dari hasil pengamatan, ditemukan bahwa sistem keuangan cashless dalam pengelolaan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Karawang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Penerapan teknologi digital penggunaan sistem seperti SPAN dan epayment terbukti mendukung percepatan proses transaksi, memperkecil kemungkinan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan [6]
2. Kemudahan dalam proses audit dan pelaporan dengan sistem digital yang mencatat transaksi secara otomatis dan sistematis, proses audit serta rekonsiliasi keuangan menjadi lebih mudah dilakukan, karena data yang dibutuhkan tersedia secara real-time dan terdokumentasi dengan rapi.
3. Kesiapan infrastruktur teknologi efektivitas sistem cashless sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang stabil dan perangkat kerja yang memadai. Beberapa hambatan ditemukan dalam bentuk koneksi yang tidak konsisten dan kurangnya peralatan pendukung di beberapa bagian kerja.
4. Kompetensi sumber daya manusia tingkat kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem digital sangat berpengaruh terhadap kelancaran implementasi cashless. Sebagian pegawai yang belum terbiasa dengan sistem baru masih menunjukkan ketergantungan pada metode manual.
5. Sikap dan penerimaan terhadap perubahan terdapat resistensi dari sebagian pegawai terhadap digitalisasi sistem, yang kemungkinan besar dipicu oleh keterbatasan pemahaman serta rasa enggan untuk keluar dari kebiasaan kerja sebelumnya.

6. Dukungan dan komitmen manajerial Peran pimpinan dalam memberikan arahan, dukungan fasilitas, serta pelatihan berkala menjadi faktor kunci dalam mendorong adopsi sistem cashless secara merata di seluruh unit kerja.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan sistem keuangan cashless di Kantor Kementerian Agama Karawang tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, melainkan juga oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan manajerial yang konsisten. Untuk itu, dibutuhkan langkah strategis seperti peningkatan pelatihan, pembaruan perangkat kerja, dan sosialisasi berkelanjutan guna membangun pemahaman yang positif terhadap transformasi digital dalam pengelolaan keuangan instansi. [7]

4.2 Pembahasan

Penerapan sistem keuangan berbasis cashless di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan administrasi keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan hasil kerja praktik yang dilakukan oleh penulis, sistem non-tunai terbukti mampu mempercepat proses transaksi keuangan dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Hal ini selaras dengan prinsip good governance, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Implementasi sistem cashless dilakukan melalui penggunaan berbagai instrumen digital seperti SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), epayment, serta pemanfaatan layanan perbankan elektronik. Melalui sistem ini, proses pencairan anggaran dan pelaporan keuangan menjadi lebih terkendali karena setiap transaksi tercatat secara otomatis, sehingga audit dan rekonsiliasi data dapat dilakukan dengan akurat dan efisien. [8]

Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini masih menemui sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang belum stabil dan perangkat keras yang belum memadai di beberapa unit kerja. Selain itu, masih terdapat resistensi dari sebagian pegawai yang belum terbiasa dengan sistem digital dan cenderung lebih nyaman dengan metode konvensional. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi teknologi, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses adaptasi.

Proses administrasi yang masih dominan manual, seperti pengiriman surat fisik dan pencatatan keuangan konvensional, juga menjadi hambatan tersendiri. Ditambah lagi, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem cashless membuat sulit untuk mengukur sejauh mana efektivitasnya telah tercapai.

Sebagai solusi, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala terkait teknologi keuangan digital dan sosialisasi manfaat sistem cashless. Modernisasi sistem administrasi, termasuk digitalisasi dokumen dan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan, juga penting untuk mempercepat proses kerja dan mengurangi potensi kesalahan manual. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi, seperti penyediaan perangkat digital dan penguatan jaringan internet, sangat krusial agar sistem cashless dapat berjalan optimal. [9]

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi sistem keuangan cashless, hasil kerja praktik menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi besar untuk mentransformasi pengelolaan keuangan di instansi pemerintahan. Dengan dukungan kebijakan internal, pelatihan SDM, dan infrastruktur yang memadai, sistem ini dapat mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan modern.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem keuangan berbasis cashless memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan instansi. Penerapan sistem ini mempercepat proses transaksi, meminimalisasi kesalahan administrasi, serta memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara sistematis. Meski demikian, pelaksanaan sistem cashless masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan pegawai, serta resistensi terhadap perubahan metode kerja. Secara keseluruhan, sistem cashless memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintahan apabila diikuti dengan upaya pembenahan pada berbagai aspek pendukung.[10]

Perlu dilakukan pelatihan berkala bagi seluruh pegawai guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan penggunaan sistem keuangan berbasis digital. Sosialisasi yang berkesinambungan tentang manfaat dan kemudahan sistem cashless juga perlu ditingkatkan untuk membangun kesiapan dan penerimaan pegawai terhadap perubahan. Terakhir, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi secara rutin sangat penting untuk mengukur keberhasilan implementasi serta merumuskan strategi perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. A. Mubarak and M. H. Akhmadi, "IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PEMBAYARAN DIGITAL PAYMENT DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN BERBASIS CASHLESS DI MASA PANDEMI COVID-19".
- [2] A. S. Y. A. R. I. Nurdin, "Cashless," 2023.
- [3] K. H. A. Wahid and E. Chumaidi, "MODEL PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN SISTEM CASHLESS DI UIN," pp. 16-26, 2023.
- [4] N. Putu, A. Aryawati, M. Si, T. K. Harahap, S. Sos, and M. Si, *Tahta Media Group*.
- [5] E. D. Mega, "Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Pada SMKN 1 Marga Sekampung," *J. Ilm. Mhs. Sist. Inf. dan Komput. Akunt.*, vol. 1, no. 2, pp. 71-77, 2023.
- [6] S. Rahman, S. Hartanto, and A. Harkat, "Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I," *J. Akunt. Terap. dan Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 64-72, 2023, doi: 10.25047/asersi.v3i1.3901.
- [7] P. Nadhilah, R. I. Jatikusumo, and E. Permana, "Efektifitas Penggunaan E-Wallet Dikalangan Mahasiswa Dalam Proses Menentukan Keputusan Pembelian," *JEMMA (Journal Econ. Manag. Accounting)*, vol. 4, no. 2, p. 128, 2021, doi: 10.35914/jemma.v4i2.725.
- [8] "Pengelolaan Keuangan," vol. 20, 2020.
- [9] H. S. Anwar, R. Denata, and A. I. I. Firdaus, "Digitalisasi Pendidikan Pesantren melalui Sistem Pembayaran Cashless Menggunakan Ngabar Smart Payment di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar," *MA'ALIM J. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 43-53, 2023, doi: 10.21154/maalim.v4i1.6678.
- [10] P. Lahida *et al.*, "Sistem Informasi Keuangan," vol. 1, pp. 841-850, 2009.